

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA SKPD PEMERINTAH ACEH (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH)

Oleh : ZARZANI
DOSEN TETAP AKUNTANSI
STIES BANDA ACEH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan satu variable dan tidak mengetahui hubungan dan pengaruhnya variable lainnya. Sampel penelitian ini sebanyak 40 orang responden, dengan menggunakan metode sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kriteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan Uji t-one sampel dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dari hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, sebagai salah satu lembaga Pemerintah Aceh belum optimal dan masih perlu ditingkatkan sebagaimana maksud PP nomor 71 Tahun 2010. Hasil uji one sampel test menunjukkan bahwa $t_{hitung} (-20.713)$ lebih kecil dari $t_{tabel} (2.3451)$ ($-20.713 < 2.3451$). Artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum optimal, (75,7 %), namun relative baik

Kata Kunci : Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah , Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan reformasi di Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan – perubahan mendasar tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut berisi dan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk

segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. Sejalan dengan maksud tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 Permendagri tersebut memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas yang selanjutnya dimodifikasian mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*), sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Nofria, Melsi. 2008. :4-5)

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. *Content* pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dan dihasilkan melalui sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna. Untuk itu perlunya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang memadai (Yuhertiana, 2006 dalam Darmawan, Cecep, (2008:12).

Dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan system akuntansi pemerintahan dengan sebaik mungkin. (Amin, Rahmanurrrasyid, (2008:10)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah dan Jajarannya memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. System akuntansi keuangan daerah (SAKD) terdapat pada dua subsistem yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, Oleh karena itu setiap SKPD harus menerapkan system akuntansi keuangan daerah yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang berguna untuk bagi pihak kepentingan lainnya.

Sejalan dengan pengelola keuangan daerah salah satu SKPD diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. SKPD ini (Dinas Tenaga Kerja dan Mobiltas Penduduk Aceh) dalam pengelolaan dana APBD telah menggunakan sisten akuntansi keuangan daerah mulai dari dokumen, pencetakan dan menghasilkan laporan keuangan. Metode Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diigunakan selama ini adalah menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sebagai bahan pembuatan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini Dinas Keuangan Aceh.

Namun penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh ini belum memadai dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi.. Hasil wawancara penenliti dengan salah seorang petugas keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengatakan bahwa penerapaaan system akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobiltas Penduduk Aceh ini masih menggunakan *kas basis (cash basic)* dan sedang menuju *accruaalbasis*.. Namun dengan system akuntansi keuangan daerah yang diterapkan selama telah dapat menghasilkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur Pemerintah Aceh sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan.

Berdasarkan penjelsan yang telah dipaparkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul ***Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Aceh (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh)***.

2. LANDASAN TEOITIS

2..1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Selanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi pemerintahan, mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Daerah.

Selanjutnya pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menegaskan bahwa Sitem Akuntansi Pemerintahan Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim (2007:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Berbeda dengan Abdul Halim, menurut Dedi Nordiawan (2006:35) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah

proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Dedy menegaskan Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi

2.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Mardiasmo, American Accounting Associating dalam Deddi, Nordiawan dkk. (2007:32), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.3. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu :

- a. Melaksanakan transaksi
- b. Mencatat transaksi kedalam bukti transaksi
- c. Menjurnal
- d. Memposting
- e. Membuat neraca percoabaan sebelum jurnal penutup
- f. Membuat neraca lajur
- g. Membuat neraca
- h. Membuat laporan surplus dan deficit
- i. Membuat jurnal penutup
- j. Membuat neraca setelah jurnal penutup.

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat (3). Sistem Akuntansi Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 ayat (1) sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi : prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada APBD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas dasar pertanggungjawaban APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klarifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai SKPD.

Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah : metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.

d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan selain kas pada SKPD.

Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Pencatatan

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 234 ayat (3) menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Selanjutnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. Double Entry

Sistem pencatatan Double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara pencatatan double entry dijalankan, Satuan Pemegang Kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

b. Dasar Pengakuan

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat.

Untuk menentukan kapan transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi, antara lain :

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.

2. Basis Akrual (*Akrual Basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasi (*Modified Acrual Basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasi (*Modified Acrual Basis*)

Basis mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

2.5. Elemen – elemen Dan Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Retno (2009:38) , menetapkan elemen elemen dan indikator Sistem akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

1). Elemen Sistem Akuntansi keuangan Daerah, yaitu :

Transaksi

Transaksi merupakan bagian yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen, atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing kas bendahara.

a. Jurnal

Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologi (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

b. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat didalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, hutang, dan ekuitas.

c. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang mempertanyai pada suatu periode tertentu.

d. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Penyesuaian dibutuhkan ketika transaksi-transaksi mempengaruhi pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran. Penyesuaian ini mengakui pendapatan dalam periode dimana pendapatan tersebut terhimpun, dan belanja/biaya dalam periode dimana barang dan jasa berkaitan digunakan. Sebuah penyusunan akan selalu melibatkan sebuah rekening atau sebuah rekening belanja/biaya dan sebuah rekening aktiva atau rekening hutang/kewajiban.

e. Laporan Keuangan

f. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Biasanya dilakukan pada akhir periode anggaran tahunan.

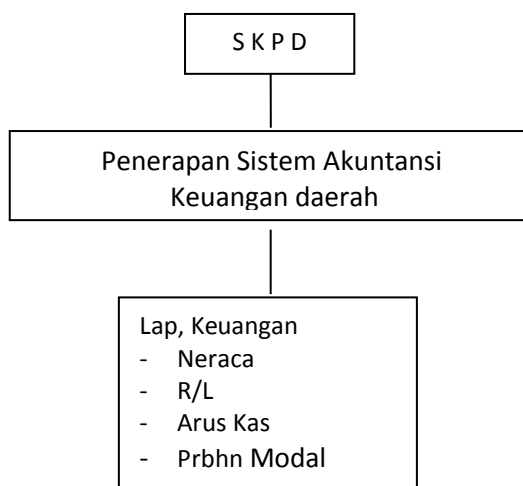
2) Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan elemen system akuntansi keuangan daerah tersebut, maka dapat disusun indicator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu Jumlah item pertanyaan adalah 8 item sebagai berikut :

1. Kesesuaian sistem dengan SAP
2. Pengidentifikasian transaksi
3. Pencatatan transaksi
4. Bukti disetiap transaksi
5. Pencatatan kronologis
6. Pengklasifikasian transaksi
7. Laporan keuangan setiap periode
8. Pelaporan yang konsisten dan periode

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram, Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:87) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap factor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan hipotesis sebagai berikut : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum optimal sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3/ METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi penelitian jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai yang mempunyai jabatan struktural dan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pegawai/staf yang berkaitan pengelolaan system akuntansi keuangan daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
3. Pegawai butir 1 dan 2 diatas, mempunyai pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan minimal 2 tahun.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, jumlah pegawai yang memenuhi kriteria tersebut sebagai populasi berjumlah 40 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Populasi Yang memenuhi Kriteria

No	Unsur	Jumlah (orang/esponden)
1	Sekretaris/Mewakiki	1
2	Kepala Bidang /mewakili	8
3	Kepala UPTD/mewakili	3
3	Kepala Seksi	16
4	Staf Akuntansi	5
5	Staf Keuangan	7
	Total Popuasi yg memenuhi kriteria	40

Karena jumlah populasi relative kecil, maka metode penarikan sampel digunakan metode sensus atau metode jenuh, yaitu semua elemen populasi 40 elemen dijadikan sampel penelitian.(Sugiyono, 2008:84).

3.3 Metode Pengumpulan Data

1). Data primer.

a. Kuesioner .

Kuesioner adalah daftar pertanyaan/pernyataan secara tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden, sedangkan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5.

2) Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur dari berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dimaksudkan untuk mengoperasionalkan dan atau operasional mendefiinisikan agar dapat diukur dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SAKD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013, pasal 1 butir 8)	1.Kesesuaian dengan SAP	1 – 5	Interval
		2.Pengidentifikasian transaksi	1 – 5	Interval
		3. Pencatatan transaksi	1 – 5	Intrval
		4.Bukti transaksi	1 – 5	Interval
		5.Pencatatan kronologis	1 – 5	Interval
		6.Pengklasifikasian transaksi	1 – 5	Interval
		7.Laporan keuangan setiap periode	1 - 5	Interva
		8.Pelaporan konsisten	1 – 5	Interval

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:147) mengatakan bahwa hipotesis dekriptif yang diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sample dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Sugiyono mengatakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Sugiyono tersebut langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Membuat tabulasi data sesuai dengan jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan.
- 2) Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi,
- 3) Menentukan uji t-test satu sampel (menggunakan alat bantuan SPSS untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya yaitu :

3.6 Rancangan Pengujian Hipotasis :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima hipotesa nol (H_0) artinya hipotesis diterima yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Penduduk Aceh belum optimal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku

- b. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesa nol ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sudah optimal/ sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Hasil dapat dilihat pada tabel 4.3. .

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliability dan Validitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.882	.882	8

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	26.0750	7.917	.324	.287	.894
BUTIR	25.9250	6.122	.689	.622	.866
BUTIR 3	26.0000	7.128	.616	.564	.870
BUTIR 4	26.5500	6.664	.728	.912	.859
BUTIR 5	26.6250	6.599	.801	.853	.852
BUTIR 6	26.5750	6.661	.811	.944	.851
BUUTIR 7	26.8500	6.592	.769	.718	.854
BUTIR 8	27.3250	7.251	.485	.390	.883

Summary Item Statistics							
	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.784	2.950	4.350	1.400	1.475	.227	8

Dari tabel tersebut diatas dapat diinterpretasi Uji Reliabilitas dan Validitas sebagai berikut :

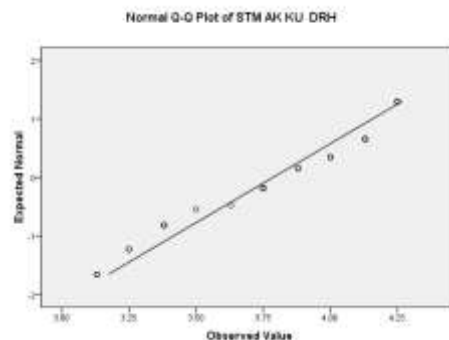
1. Pada bagian Reliabilitas Statistic terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbachs* hitung $0.8820 > 0.3120$ pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05 % atau Total *Alpha Cronbachs* diatas 50 % , artinya semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat reliable yang berarti kuesioner yang digunakan adalah handal.

2. Pada *Item Total Statistic*, Nilai *Corrected Item Total Correlation* (r) hitung > 0.3120 (table), maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 8) dapat dinyatakan valid.

4.1.4 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut .:

Gambar 4.1



Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali,2005:110):

1. Grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Artinya bahwa data variabel Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. terbukti berdistribusi normal.

4.1.5. Pengujian Hipotesis Deskriptif.

Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS (*Statistical Program For Social Science*)

Hasil uji t one sample sebagai berikut :

Uji t One Sampel
One-Sample Test

	Test Value = 5					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
SAKK DAERAH	- 20.713	39	.000	-1.21325	-1.3317	-1.0948

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SAKK DAERAH	40	3.7867	.37045	.05857

Dari uji one sampel test dapat dilihat bahwa t hitung -20.713 yaitu t hitung (1.4650) lebih kecil dari t tabel (2.3451) ($-20.713 < 2.3451$). Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima diterima. Artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, belum optimal, yaitu dilaksanakan 75,7 %, namun relative baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. sebagai salah satu lembaga Pemerintah Aceh belum optimal dan masih perlu ditingkatkan sebagaimana maksud PP nomor 71 Tahun 2010. Hasi; uji one sampel test menunjukkan bahwa $t_{hitung} -20.713$ yaitu $t_{hitung} (1.4650)$ lebih kecil dari $t_{tabel} (2.3451)$ ($-20.713 < 2.3451$). Artinya bahwa Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh belum optimal, (75,7 %), namun relative baik.

5.2. Saran-saran

1. Disarankan kepada penelitian selanjutnya/mendatang untuk melakukan penelitian yang sama dengan memasukkan unsur unsur variabel lainnya, karena dengan satu variable penulis menganggap akan belum memberikan hasil yang sempurna baik bagi Pemerintah Aceh maupun dalam pengembangan ilmu internal audit.
2. Disarankan Dinas Nakermobduk Aceh menerapkan Sisten Akuntansikeuangan Daerah sesuai dengan PP nomor 7a tah 2010 dan peraturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahmanurrasyid, (2008), **Akuntabiitas Dan Tranparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Pemerintahan yang Baik di Daerah**, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang;
- Abdul, Halim.(2007). **Akuntansi Keuangan Daerah**. Salemba Empat. Jakarta.
- Darmawan, Cecep, (2008), **Kat Sukses Manajemen Rasulullah**, Yogyakarta, Khazzanah Intelektual
- Deddi, Nordiawan. (2006). **Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Deddi, Nordiawan dkk. (2007). **Akuntansi Pemerintahan**. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam, (2005). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Indra, Bastian. (2006). **Akuntansi Sektor Publik**. Erlangga. Jakarta

Nofria, Melsi. (2008). **Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**, Tesis, PascaSarjana, Fak. Ekonomi, Univ. Diponegoro, Malang;

Nordiawan Deddi, (2006), **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Pemerintah **Nomor 71 Tahun 2010**, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 13 Tahun 2006**, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 64 Tahun 2006**, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, **Undang-undang No.32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sugiyono, (2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta IKAPI, Bandung.

Sugiyono, (2014), **Metode Penelitian Manajemen** Alfabeta IKAPI, Bandung.